

DAFTAR BACAAN

Buku

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>.

Fadli, Moh., Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, 2016.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

-----, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Karnantohadi, Pung, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

-----, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017.

Sembiring, Raynaldo, et.al., *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law, 2014.

Sutedi, Adrian *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

-----, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Prizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009.

Tesis

Pasaribu, Hokmen Juanda, *Politik Hukum Terhadap Dinamika Kewenangan Lembaga Peradilan dan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan antara Ny. Siti Hardianti Rukmana dengan PT. Berkah*

Karya Bersama dan PT. Cipta Televisi Republik Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2018.

Jurnal

Arrum, Desi Arianing, 'Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia', *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5, 2019.

Efendi, A'an, 'Instrumen Hukum Lingkungan Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan', *Jurnal Supremasi*, Vol. 6, No. 1, 2016.

Faiz, Pan Mohamad, 'Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Prespektif Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016.

Hadjon, Philipus M., 'Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 4, 1995.

Helmi, 'Kedudukan Izin Lingkungan dalam sistem perizinan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2009.

MD, Moh. Mahfud, 'Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah', *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2007.

Mubarak, Arya Rema, 'Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Panambunan, Amelia M. K., 'Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan', *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2, 2016.

Ramadhan, Bayu Ariefka, 'Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Sidoarjo dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan', *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 6, 2020.

Rhiti, H. dan Y. Sri Pudyatmoko, 'Kebijakan Perizinan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 2, 2016.

Susanto, Sri Nur Hari, 'Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi', *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Wati, Evi Purnama, 'Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan', *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Yulianita, Erida Putri, 'Izin Kegiatan Usaha Perdagangan bagi Usaha Online', *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 5, 2020.

Yusa, I Gede dan Bagus Hermanto, 'Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018.

Artikel

Wibisana, Andri Gunawan, 'Catatan Kritis atas Ketentuan Mengenai Lingkungan Hidup dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja', *Traction Energy Asia*, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256;

Internet

NN, “Politik Perundang-undangan”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, dikunjungi pada tanggal 21 Juni 2021.